

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**Bima Christian<sup>1</sup>, Een Novritha Walewangko<sup>2</sup>, Krest D.Tolosang<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,*

*Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email: [bimachristian@gmail.com](mailto:bimachristian@gmail.com)

### ABSTRAK

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yaitu daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangannya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Objek dalam penelitian ini adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat fiskal, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Minahasa Selatan tidak mampu mengelolah keuangan daerah yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dengan katagori rendah sekali dikarenakan pemerintah kabupaten minahasa selatan masih berharap pada transfer dana perimbangan.

**Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah; Otonomi Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah**

### ABSTRACT

*The success of regional autonomy cannot be separated from the ability of a region in the financial sector. Autonomous regions must have the optimal authority and ability to explore their own financial sources. The financial aspect is one of the basic criteria to be able to really know the ability of the region to take care of its own household. The ability of the region, namely the region is able to explore its own financial sources to finance its financial needs without relying on the central government. The object of this research is the Regional Financial and Asset Management Agency of South Minahasa Regency. The purpose of this research is to analyze Regional Financial Capability in the Implementation of Regional Autonomy in South Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative and quantitative which is then analyzed using several ratios, namely the independence ratio, fiskal degree ratio, growth ratio and effectiveness ratio. The results showed that the South Minahasa district government was not able to manage regional finances which caused the lack of independence in regional financial management in the very low category because the South Minahasa district government still hoped for the transfer of balancing funds.*

**Keywords: Regional Financial Management; Regional autonomy; Regional Financial Capacity**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, daerah diberikan hak otonomi sehingga setiap daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur segala urusan rumah tangga sendiri otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2005). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yaitu pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangannya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat.

Untuk itu penulis berpikir bahwa peranan data keuangan daerah sangat penting guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah, kemudian berdasarkan data tersebut bisa

memberikan gambaran secara nyata terkait perkembangan anggaran serta realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Informasi inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan keuangan daerah (Khusaini, 2018). Berikut data uraian laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Minahasa Selatan 2017-2021 :

**Tabel 1. Uraian Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2017-2021 (Rp.)**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah
2017	45.614.293.035,00	42.778.933.212,00	799.878.945.345,00	1.301.745.442.987,00
2018	56.670.037.683,00	38.521.274.380,00	782.746.973.412	1.021.645.339.244,00
2019	62.381.908.772,00	44.055.469.890,58	746.373.050.829	996.210.356.105,58
2020	29.934.293.614,00	30.054.603.218,39	661.393.100.765	903.926.276.722,39
2021	34.701.942.900,00	34.701.942.900,00	896.845.372.351	951.889.242.251,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2022

Selanjutnya berdasarkan uraian pada tabel 1 di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan empat rasio seperti rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Sehingga penulis ingin meneliti data di atas apakah kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Minahasa Selatan berjalan baik atau tidak, sehingga terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang telah di lakukan oleh kabupaten Minahasa Selatan dalam kemampuan keuangan daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Keuangan Daerah

Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah. PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain (Widjaja, 2011). PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu setahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat perhitungan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendaptan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah (Badrudin, 2017). APBD merupakan rencana keuangan daerah yang merupakan program dari pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah (Wulandari, Phaureula dan Iryanie, 2018). Anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Sudaryo, Sjarif dan Sofiati, 2017):

- Rencana suatu kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya.
- Biaya sehubungan dengan aktivitas.
- Aktivitas tersebut dan adanya hubungan biaya.
- Biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran.

Dalam penyusunan APBD di butuhkan proses penyusunan dan persetujuan melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait kebijakan umum APBD dan prioritas dalam menyusun APBD. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten yaitu, pihak eksekutif

dan pihak legislatif. Pihak eksekutif terdiri dari bupati/walikota, sekretaris daerah, tim anggaran eksekutif, satuan kerja perangkat daerah, badan perencanaan, pembangunan daerah, dan badan pengelolaan keuangan daerah (Sujarweni, 2015). Pihak legislatif terdiri dari panitia anggaran legislatif, dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alat keengkapan DPRD yang di bentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintah, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah serta kesejahteraan rakyat.

## 2.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2011). Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisien dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2021a). Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon. Penelitian ini berbentuk survei atas data sekunder yang mengambil lokasi di kota Tomohon dengan menggunakan data perhitungan APBD kota Tomohon selama periode tahun 2007-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan kota Tomohon dalam mengelola pendapatan asli daerah PAD yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya (Wurungian, Engka dan Tolosang, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kemampuan keuangan otonomi daerah di kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh kantor BKPD kabupaten Bone Bolango. Metode analisis rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis yang telah dilakukan adalah bahwa kemandirian keuangan kabupaten Bone Bolango berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah terhadap otonomi daerah, kemampuan keuangan kabupaten Bone Bolango berdasarkan pada rasio kemampuan keuangan daerah sangat rendah pada otonomi daerah.

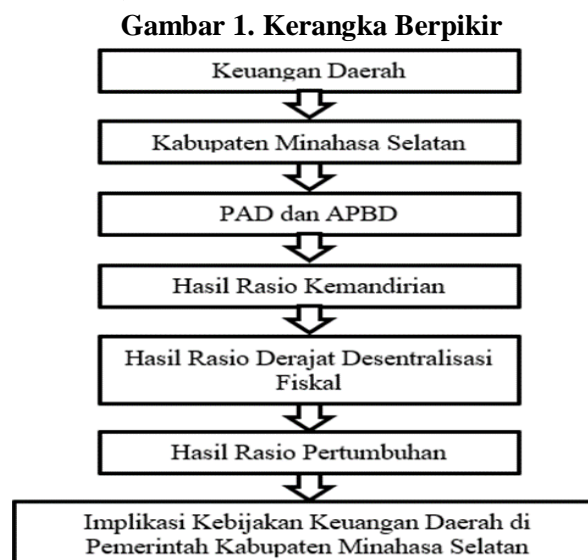
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah kota Palu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuangan daerah rasio kemerdekaan dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keuangan daerah kemampuan kota Palu yang dihitung dengan menggunakan rasio keuangan daerah kemerdekaan yang dinyatakan tidak dapat mendukung pelaksanaan peraturan daerah otonomi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis data keuangan daerah rasio kemandirian yang relatif rendah sebesar 25,09 persen sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan, kota Palu masih membutuhkan bantuan dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi (Jaya, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas desentralisasi fiskal kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada peta kemampuan keuangan daerah menggunakan indeks saham dan indikator pertumbuhan, indeks desentralisasi daerah, dan indeks kemandirian daerah. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian kota Balikpapan, kota Samarinda, kota Bontang, dan kabupaten Berau merupakan daerah yang dapat dikatakan layak dalam pelaksanaan otonomi fiskal. Daerah lain tidak memungkinkan. Bahkan, dalam jangka panjang akan ada kendala karena daerah yang dianggap layak otonomi fiskal mengandalkan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat bergerak ke sektor pengolahan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan (Soeharjoto, Tribudhi dan Nugroho, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kabupaten Nagekeo pada tahun 2017-2019 dilihat dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, analisis rasio efektivitas PAD, analisis rasio efisiensi keuangan daerah dan analisis rasio keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komperatif, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Nagekeo, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif komperatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut: analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, analisis rasio efektivitas PAD, analisis rasio efisiensi keuangan daerah dan analisis rasio keserasian. Hasil penelitian ini analisis rasio kemandirian keuangan daerah, dapat dikategorikan rendah sekali dengan rata-rata 6,4%%, analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa pertumbuhan dengan rata-rata 6,0%, analisis rasio efektivitas PAD, dapat dikategorikan dengan rata-rata 105%, analisis rasio efisiensi keuangan daerah, dapat dikategorikan dengan rata-rata 85,16%, analisis rasio keserasian di lihat dari belanja Operasi dapat dikategorikan dengan rata-rata 66,7% sedangkan di lihat dari belanja modal dikategorikan dengan rata-rata 27,9% (Nalle, Oki dan Sangaji, 2021).

#### 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2017).



*Sumber : Data diolah penulis*

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir penelitian, maka terciptalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu, diduga kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Minahasa Selatan berjalan baik.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non statistik atau non matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

Tempat dan waktu dilakukan penelitian pada kantor bupati Minahasa Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai selesai. Jenis, sumber dan metode pengumpulan data Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data adalah input utama yang akan diolah dalam proses penelitian untuk menghasilkan output yang akan menjawab masalah dan pertanyaan penelitian (Abdillah dan Hartono, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa interview dengan pegawai yang ada di kantor bupati minahasa selatan mengenai pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kantor bupati Minahasa Selatan.

Sumber data secara umum, dapat dibedakan menjadi data primer dan data (Abdillah dan Hartono, 2015). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder menunjukkan ketidakaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut karena telah diolah untuk kepentingan tertentu. Data sekunder pada umumnya bersumber dari sumber sekunder tetapi dapat pula bersumber dari sumber primer. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data olahan dan diperoleh langsung dari laporan penerimaan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan melengkapi penelitian ini, untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei pendahuluan, studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Interview, teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Interview langsung dengan pegawai yang mengetahui tentang laporan APBD kabupaten Minahasa Selatan untuk mendapat informasi mengenai keuangan daerah kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada tahun anggaran 2017-2021.
2. Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti dan mengamati apa yang menjadi sasaran bahan pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.
3. Kuesioner, teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak perusahaan dan industry mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian, keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pemangungan dan pelayanan keada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2015). Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tingkat kemandirian serta

pertumbuhan yang semakin baik maka akan dapat berimbang pada pertumbuhan ekonomi (Walewangko, 2016). Rumus yang dapat digunakan dalam rasio kemandirian ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjam}} \times 100\%$$

Untuk melihat kemampuan kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan variable kemandirian dan kategori pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Halim, 2022) sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (Kemandirian).

**Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (Kemandirian)**

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25 %	Isnruktif
Rendah	26-50 %	Konsultatif
Sedang	51-75 %	Partisipatif
Tinggi	76-100 %	Delegatif

Sumber: *Keppmendagri, 1996*

- Rasio derajat desentralisasi fiskal, dihitung berdasarkan perbandingan anar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2015). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{PAD}{PD} \times 100\%$$

Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal kabupaten Minahasa Selatan digunakan skala interval pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Desentralisasi Fiskal)**

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01	Sangat Baik

Sumber: *Keppmendagri, 1996*

Rasio pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode (Hanafi dan Halim, 2007). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD\ t1 - PAD\ t0}{PAD\ t0} \times 100\%$$

3. Rasio efektivitas, ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak *outcome* dari keluaran output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2021).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan maka penilaian kriteria efektivitas dapat diukur tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Kepmendagri, 1996):

**Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)**

Tingkat Ketaatan Sampel	Kriteria Efektif
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri, 1996

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2018-2020**

URAIAN	TAHUN REALISASI (RP)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	45.614.293.035,00	56.670.037.683,00	62.381.908.772,00	29.934.293.614,00	34.701.942.900,00
Realisasi PAD	42.778.933.212,00	38.521.274.380,00	44.055.469.890,58	30.054.603.218,39	34.701.942.900,00
Pendapatan Transfer	799.878.945.345,00	782.764.973.412,00	746.373.050.829,00	661.393.100.765,00	896.845.372.351,00
Pendapatan Daerah	1.301.745.442.987,00	1.021.645.339.244,00	996.210.356.105,58	903.926.276.722,39	951.889.242.251,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan 2022

##### Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat/provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Berikut adalah perhitungan rasio kemandirian kabupaten Minahasa Selatan:

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Kab. Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018-2020**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (RP)	PENDAPATAN TRANSFER (RP)	RASIO KEMANDIRIAN
2017	42.778.933.212,00	799.878.945.345,00	5,35%
2018	38.521.274.380,00	782.746.973.412	4,92%
2019	44.055.469.890,00	746.373.050.829	5,90%
2020	30.054.603.218,39	661.393.100.765	4,54%
2021	34.701.942.900,00	896.845.372.51,00	3,87%

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan 2022 dan Data Diolah

Pada tabel diatas, bisa dilihat dan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam lima tahun terakhir (2017-2021). Pada tahun 2017 rasio yang dihasilkan yaitu 5,35% kemudian pada periode selanjutnya yaitu 2019 turun menjadi 4.92%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,90% dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 4,54% untuk tahun 2020 dan 3,87% untuk tahun 2021.

**Tabel 7. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

KEMAMPUAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	POLA HUBUNGAN
Rendah Sekali	0 – 25 %	Instruktif
Rendah	>25-50 %	Konsultif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100 %	Delegarif

Sumber: Sumber: Kepmendagri, 1996 dan Data Diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio kemandirian pemda kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tingkat kemampuan keuangan yang masih sangat rendah sekali. Atau termasuk kedalam pola hubungan yang Instruktif yang dapat diartikan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Yang berarti pemerintah kabupaten Minahasa Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat.

#### **Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah (PAD)**

Rasio efektifitas akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Susanto, 2019). Semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah semakin baik. Berikut perhitungan rasio efektifitas pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018-2020**

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAD (RP)	REALISASI PENERIMAAN PAD (RP)	RASIO EFEKTIFITAS
2017	45.614.293.035,00	42.778.933.212,00	94%
2018	56.670.037.683,00	38.521.274.380,00	68%
2019	62.381.908.772,00	44.055.469.890,58	71%
2020	29.934.293.614,00	30.054.603.218,39	100%
2021	42.778.933.212,00	34.701.942.900,00	100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan 2022 dan Data Diolah

Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa perhitungan rasio efektifitas pada lima tahun terakhir dimana pada tahun 2017 rasio efektifitas mencapai 94% kemudian menurun sebanyak 26% tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 menjadi 71% selanjutnya terjadi lagi peningkatan yang besar yaitu sebesar 29% sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 rasio efektifitas dari pemerintah kabupaten Minahasa Selatan menjadi 100%. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas dan membandingkan pada tabel kriteria efektifitas bisa dilihat pada tahun 2018 dan 2019 kemampuan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam merealisasikan PAD masih kurang efektif namun untuk tahun 2020 terjadi peningkatan terkait rasio efektifitas menjadi 100% sehingga dikategorikan efektif.

#### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) nya. derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total



penerimaan daerah (Sistiana & Makmur, 2014). Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten Minahasa Selatan.

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Kab. Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018-2019**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (RP)	TOTAL PENERIMAAN DAERAH (RP)	RASIO DESENTRALISASI FISKAL
2017	42.778.933.212,00	1.301.745.442.987,00	3,3%
2018	38.521.274.380,00	1.021.645.339.244,00	3,8%
2019	44.055.469.890,58	996.210.356.105,58	4,4%
2020	30.054.603.218,39	903.926.276.722,39	3,3%
2021	34.701.942.900,00	951.889.242.251,00	3,6%

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan 2022 dan Data Diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas hasil yang didapat yaitu pada tahun 2017 = 3,3%, tahun 2018 = 3,8% , tahun 2019 = 4,4%, tahun 2020 = 3,3% dan tahun 2021 = 3,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang ada pada kabupaten Minahasa Selatan masih kurang karena masuk dalam skala interval 0,00% -10% yaitu sangat kurang.

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang didapat dengan perhitungan data dengan tahun berjalan dikurangi dengan data tahun sebelumnya, maka aan didapat pertumbuhan yang ada didaerah tersebut. Melalui rasio ini kita dapat melihat dan mengukur seberapa besar pertumbuhan yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan selama periode 2017-2021.

**Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018-2020**

TAHUN	PAD <sub>t<sub>0</sub></sub> (RP)	PAD <sub>t<sub>1</sub></sub> (RP)	RASIO DESENTRALISASI FISKAL
2017-2018	42.778.933.212,00	38.521.274.380	-9,95%
2018-2019	38.521.274.380,00	44.055.469.890	14,37%
2019-2020	44.055.469.890,00	30.054.603.218,39	-31,78%
2020-2021	30.054.603.218,39	34.701.942.900,00	15,46%

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan 2022 dan Data Diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan pada periode 2017-2018 menunjukkan nilai sebesar -9,95% terjadi kenaikan sebesar 24,32% pada tahun 2018-2019 namun pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sebesar -46,15% dan pada tahun 2020-2021 menunjukkan peningkatan sebesar 47,24%. Semakin meningkatnya PAD dari tahun ke tahun menandakan bahwa semakin tumbuhnya pembangunan di daerah tersebut sehingga semakin banyak juga pemasukan yang di dapat oleh pemerintah daerah Minahasa Selatan walaupun terjadi penurunan pada periode 2017-2018 dan 2019-2020.

#### 4.2 Pembahasan

##### Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, kemampuan pengelolaan keuangan daerah kabupaten minahasa selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dikatakan masih sangat tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak mampu membiayai semua pengeluaran daerah berdasarkan pendapatan yang dikelola oleh daerah. Kurangnya pendapatan daerah dari sektor utama seperti pajak dan retribusi tentu merupakan efek dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan, untuk meningkatkan roda perekonomian. Peran kesadaran masyarakat sangat perlu untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam implikasi kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi

daerah di kabupaten Minahasa Selatan, pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali semua sumber pendapatan, akan tetapi dalam membiayai semua urusan anggaran belanja pemerintah daerah minahasa selatan masih bergantung pada transfer pusat dan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah Minahasa Selatan sudah melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dikelola dengan benar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan di daerah Tomohon dimana hasil penelitiannya menunjukkan ketidakmampuan kota Tomohon dalam mengelola pendapatan asli daerah PAD yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya (Wurangian et al., 2017). Untuk itu pemerintah kabupaten Minahasa Selatan harus melakukan terobosan agar membuka sektor-sektor ekonomi produktif yang baru, maupun meningkatkan kinerja sektor ekonomi yang sudah ada guna meningkatkan pendapatan daerah yang secara otomatis akan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Minahasa Selatan.

### **Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam lima tahun terakhir (2017-2021), cenderung fluktuatif. Sebaiknya pemerintah kabupaten Minahasa Selatan lebih melihat lagi dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar supaya masyarakat dapat juga mengoptimalkan dalam urusan perpajakan yang adalah sumber penerimaan pendapatan daerah, sehingga pendapatan daerah bisa bertambah dan pemerintah lebih mandiri dalam pembangunan daerah Minahasa Selatan. Pada tahun 2017 rasio efektifitas tergolong tinggi kemudian menurun pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 sampai tahun 2021 terus meningkat. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas dan membandingkan pada tabel kriteria efektifitas bisa dilihat pada tahun 2018 dan 2019 kemampuan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam merealisasikan PAD masih kurang efektif dan tidak efektif namun untuk tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan terkait rasio efektifitas menjadi 100% sehingga dikategorikan efektif. Kedepannya pemerintah kabupaten Minahasa Selatan harus mempertahankan peningkatan pendapatan daerah agar bisa membiayai semua keperluan daerah.

Pada tahun tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang ada pada kabupaten Minahasa Selatan masih kurang karena masuk dalam skala interval yaitu sangat kurang. Penerimaan daerah yang didapat oleh pemerintah Minahasa Selatan sangat rendah, sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan harus memperhatikan infrastruktur yang ada di kabupaten Minahasa Selatan agar supaya pihak investor dapat melihat peluang untuk bersama membangun roda perekonomian dan penerimaan pendapatan daerah bisa meningkat. Pertumbuhan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan pada periode 2017-2018 cenderung fluktuatif. Semakin meningkatnya PAD dari tahun ke tahun menandakan bahwa semakin tumbuhnya pembangunan di daerah tersebut sehingga semakin banyak juga pemasukan yang di dapat oleh pemerintah daerah Minahasa Selatan walaupun terjadi penurunan pada periode 2017-2018 dan 2019-2020. Diharapkan bagi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan agar lebih memfasilitasi semua masyarakat untuk melakukan usaha mikro kecil dan menengah sehingga bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah yang ada di Minahasa Selatan.

## **5. PENUTUP**

Kurangnya pendapatan daerah dari sektor utama seperti pajak dan retribusi tentu merupakan efek dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan, untuk meningkatkan roda perekonomian. Peran kesadaran masyarakat sangat perlu untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu pemerintah kabupaten minahasa selatan harus melakukan terobosan agar membuka sektor-sektor ekonomi produktif yang baru, maupun meningkatkan kinerja sektor ekonomi yang sudah ada guna meningkatkan pendapatan daerah yang secara otomatis

akan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten minahasa selatan. Dalam implikasi kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten minahasa selatan, pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali semua sumber pendapatan, akan tetapi dalam membiayai semua urusan anggaran belanja pemerintah daerah minahasa selatan masi bergantung pada transfer pusat dan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah minahasa selatan sudah melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dikelola dengan benar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Tingkat efektivitas harus dipertahankan seperti saat ini, agar supaya pemerintah kabupaten minahasa selatan dapat mengelolah keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan walaupun jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih cukup besar. Kedepannya bagi pemerintah kabupaten minahasa selatan agar supaya lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat yaitu pembangunan sarana dan prasarana, dan meminimalisir anggaran untuk belanja rutin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103–150.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. In *UPP STIM YKPN* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2022). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2007). Analisis Laporan Keuangan. In *Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Jaya, A. H. (2021). Analysis of Regional Financial Independence for the Implementation of Regional Autonomy in Palu City in 2015-2019. *Jurnal Mantik*, 5(1), 411–416.
- Kepmendagri. (1996). 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota. In *Kementerian Dalam Negeri*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. In *Yogyakarta: UPP STIM YKPN* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021a). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021b). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(1), 277–286.
- Soeharjoto, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2020). Fiscal Regency And City Capacity In East Kalimantan In The Era Of Regional Autonomy. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(02).
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah (P. Christian, Ed.*

CV. ANDI OFFSET.

- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung* (Vol. 225). Penerbit CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1).
- Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. In *Bandung: Fokusmedia* (p. Pasal 1 Ayat 6).
- Walewangko, T. L. U. (2016). Analisis Efektivitas pencairan Tunggal Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggal Pajak di KPP Pratama Ambon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Widjaja, H. A. W. (2011). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers.
- Wurangian, S., Daisy S.M., E., & Krest D., T. (2017). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).